

KOORDINASI LURAH DENGAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN GUNTING KECAMATAN BONTANG UTARA KOTA BONTANG

Nofela Sari Mitra Susana¹

Abstrak

Artikel ini membahas tentang Koordinasi Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menguraikan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang diselidiki. Narasumber terdiri dari Lurah, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Ketua RT di Kelurahan Guntung serta masyarakat yang ada di lingkungan Kelurahan Guntung. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yaitu rangkaian proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keefektifan Koordinasi Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berjalan dengan baik. Faktor pendukung dalam Koordinasi Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Partisipasi Masyarakat. Sementara faktor penghambat dalam Koordinasi Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terdiri dari faktor penghambat Internal dan faktor penghambat Eksternal.

Kata Kunci: *Koordinasi, Pembangunan, Lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Guntung, Bontang*

Pendahuluan

Kegiatan-kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan pada hakekatnya merupakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya. Hal ini sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi : “ Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia

¹ Mahasiswa Semester Akhir Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Nofelasari09@gmail.com

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” yakni bahwa Negara Indonesia sangat luas dan selaras dengan Pembangunan Nasional yang mencakup segala aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, mengadakan musyawarah, menciptakan suasana menunjang, serta masyarakat dituntut partisipasinya mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan Pembangunan tersebut.

Pembangunan Nasional juga merupakan suatu proses perubahan yang memerlukan partisipasi masyarakat. Sehingga untuk menggerakkan dan menggugah partisipasi tersebut diperlukan komunikasi yang baik. Dengan komunikasi yang baik diharapkan adanya interaksi dalam masyarakat, dan interaksi tersebut orang dapat berhubungan satu sama lain, saling mempengaruhi, dan saling bertukar pikiran dalam bentuk komunikasi berupa koordinasi antara Lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) agar bermanfaat sehingga ide-ide Pembangunan yang dilaksanakan mendapat dukungan oleh masyarakat sehingga bersedia menerima suatu perubahan. Dimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Sebagaimana yang sudah dipaparkan diatas bahwa Koordinasi antara Pemerintahan dan Lembaga pada hakikatnya merupakan upaya memudahkan atau mengintegrasikan, menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan serta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan. Koordinasi perlu dilaksanakan sampai pada pengawasan dan pengendaliannya.

Berdasarkan peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 18 tahun 2002 tanggal 17 Agustus 2002. Guntung berubah status menjadi sebuah Kelurahan dan dipimpin seorang Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Camat. Tugas Pokok Kelurahan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam wilayah Kecamatan Bontang Utara dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan dan juga melaksanakan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kebutuhan Kelurahan. Sedangkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sendiri berdiri sejak Guntung menjadi Kelurahan dan yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pertama yaitu Bapak Mamat M. Rasyid, dan sejak Tahun 2008 sampai sekarang dijabat oleh Bapak Rahmat Haryono.

Berdasarkan observasi sementara dilapangan bahwa Koordinasi Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan fisik di Kelurahan Guntung yaitu :

Koordinasi Internal adalah Koordinasi yang dilakukan kedalam yang meliputi RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), yang dituangkan dalam

Musyawarah Pembangunan dan kemudian di usulkan ke Kecamatan Bontang Utara.

Pada akhirnya yang diharapkan dengan adanya musyawarah tersebut melalui Koordinasi dapat dipecahkan masalah keserasian proyek-proyek Pembangunan. Faktor penghambat dalam Koordinasi Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berdasarkan observasi sementara adalah terkait dengan masalah, bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kerangka Dasar Teori

Koordinasi

Menurut Sondang P. Siagian (2001:110) mendefinisikan bahwa Koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan bersama pula agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi satu kebulatan yang terintegrasi dengan cara seefisien mungkin. Berkaitan dengan hal tersebut Sondang P. Siagian menjelaskan tentang tujuan Koordinasi antara lain :

1. Pencegahan konflik dan kontradiksi
2. Pencegahan persaingan yang tidak sehat
3. Pencegahan pemborosan
4. Pencegahan kekosongan ruang dan waktu, dan
5. Pencegah terjadinya perbedaan pendekatan dan pelaksanaan.

Pada hakekatnya Koordinasi adalah perwujudan dari kerja sama, saling bantu membantu dan menghargai dan menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing.

Pembangunan

Menurut Kartasasmita (2001:66) hakekat pembangunan Nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatan sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

Selain itu Pembangunan juga merupakan perpaduan antara partisipasi masyarakat dan kegiatan Pemerintah. Pemerintah berkewajiban penyediaan prasarana-prasarana sedangkan selebihnya diberikan kepada masyarakat itu sendiri, karena pada hakikatnya Pembangunan itu dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi dalam pelaksanaan pembangunan manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatan sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Dalam hal ini Pemerintah yang memberikan pengawasan, bimbingan, bantuan, serta pembinaan kepada masyarakat.

Pembangunan merupakan salah satu usaha untuk menaikkan taraf hidup rakyat Bangsa dan Negara atau dapat meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat. Pembangunan Prasarana-prasarana tersebut merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan membantu masyarakat Kelurahan

dalam mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara menyeluruh.

Tujuan Pembangunan

Menurut Afifuddin (2012:47) pada umumnya, komponen-komponen dari cita-cita akhir dari Negara-negara modern di dunia, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang, adalah hal-hal yang pada hakikatnya bersifat relatif dan sukar membayangkan tercapainya “titik jenuh absolut” yang setelah tercapai tidak mungkin ditingkatkan lagi seperti :

- a. Keadilan sosial;
- b. Kemakmuran yang merata;
- c. Perlakuan sama dimata hukum;
- d. Kesejahteraan material, mental dan spiritual;
- e. Kebahagiaan untuk semua;
- f. Ketentraman; dan
- g. Keamanan

Dengan melihat tujuan-tujuan diatas, nyatalah bahwa sesungguhnya tidak ada titik akhir dalam Pembangunan.

Konsep Pembangunan

Menurut Khairuddin (2000:23) Pembangunan adalah usaha yang tidak dilakukan tanpa melibatkan semua potensi yang ada dari berbagai sumber daya yang ada dilingkungan.

Pembangunan terdiri dari Pembangunan fisik dan Pembangunan Non fisik, pembangunan fisik merupakan pembangunan yang bersifat infrastruktur bangunan fasilitas umum. Sedangkan pembangunan Non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, pendidikan, kesehatan yang memerlukan sarana dan prasarana yang lahan dan bahan diambil dari permukaan bumi.

Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat ahli bahwa Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Selain itu Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa Efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktifitas-aktifitas yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Lurah

Menurut Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 pasal 3 ayat 1, Kelurahan merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan. Lurah merupakan pimpinan dari Kelurahan sebagai perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Seorang Lurah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Lurah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mampu dan cakap dalam menjalankan tugas. Tugas Lurah adalah melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan Daerah serta melaksanakan Pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Menurut Peraturan Pemerintah No 73 tahun 2005 pasal 10 dan 11, menyatakan bahwa di Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang di bentuk berdasarkan prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Salah satu Tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Menyusun rencana Pembangunan secara partisipatif dan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam sebuah penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi, sehingga dengan pembatasan studi tersebut akan mempermudah penelitian dalam pengambilan dan pengolahan data yang kemudian menjadi sebuah kesimpulan.

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan bertitik tolak pada referensi di atas, maka fokus penelitian yang peneliti tetapkan meliputi :

1. Efektivitas Pembangunan, yang meliputi :
 - a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan
 - b. Gambaran Keberhasilan baik dari segi waktu, tenaga dan target penyelesaiannya.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pembangunan di Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara
 - a. Faktor pendukung
 1. Partisipasi Masyarakat
 - b. Faktor penghambat
 1. Internal
 2. Eksternal

Hasil Penelitian & Pembahasan

Keefektifan Koordinasi Lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Koordinasi yang dilakukan oleh Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berjalan dengan baik, berdasarkan hasil wawancara saya

dengan Lurah Guntung Bapak Baslan dapat diketahui bahwa Koordinasi Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) melibatkan warga Kelurahan Guntung, Ketua RT, Tokoh Agama serta Organisasi/pemuda dalam rapat-rapat rutin tiap satu bulan sekali bahkan bisa dari dua kali sebulan tergantung situasi dan kondisi, yang dimana membahas masalah-masalah yang ada dilingkungan daerah Kelurahan yaitu salah satunya masalah Pembangunan.

Selain itu yang menjadi sasaran utama dalam Pembangunan di Kelurahan Guntung dan 75% sudah terealisasi adalah pembangunan infrastruktur, program sosial, pemberdayaan masyarakat dan swasembada pangan.

Koordinasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Guntung juga selalu berkoordinasi dengan Lurah. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Bapak Rahmat Haryono bahwa Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan Lurah Guntung berjalan dengan baik dimana setiap program yang didonasikan oleh perusahaan sekitar maupun Pemerintah selalu berkoordinasi dengan Lurah. Contohnya saja program yang akan dilaksanakan oleh perusahaan Pupuk Kaltim khususnya bidang pembangunan, dimana selalu dikoordinasikan dengan Lurah.

Selain itu saya juga mewawancarai salah satu masyarakat di Kelurahan Guntung yaitu Bapak Wahyudin Nur, dimana beliau memaparkan tentang Koordinasi Lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan Masyarakat adalah berjalan dengan baik, dimana masyarakat di ikutsertakan dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Kelurahan Guntung dan menurutnya Pembangunan di Kelurahan Guntung sudah lebih baik.

Informan yang terakhir adalah Ketua RT yang dimana salah satunya saya mewawancarai Ketu RT 11 Bapak Sukana, beliau memaparkan bahwa Koordinasi Lurah maupun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan RT cukup baik dan menurut pendapat beliau bahwa RT, bersama Lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bersatu untuk membangun Kelurahan Guntung. Selain itu saya juga sering dilibatkan dalam rapat penentuan baik itu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Faktor-faktor pendukung dalam Koordinasi Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Kelurahan Guntung :

Partisipasi yang tinggi dari Lingkungan Masyarakat :

Dalam melaksanakan Pembangunan di Kelurahan Guntung untuk lebih terlaksana dengan maksimal perlu adanya kepekaan atau kesadaran masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan yang telah berjalan maupun yang belum berjalan sehingga dapat menghasilkan out put yang baik. Untuk lebih jelasnya saya telah mewawancarai bapak Baslan Selaku Lurah Guntung, dan beliau memaparkan bahwa Keikutsertaan masyarakat dalam Rapat koordinasi dan pelaksanaan pembangunan yang diadakan oleh Kelurahan Guntung sangat

menunjang pencapaian pembangunan Kelurahan Guntung, dimana rapat tersebut diselenggarakan satu bulan sekali dan dimana hasil rapat tersebut dapat membantu pihak kelurahan dalam menentukan skala prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat Kelurahan Guntung dan hasil rapat tersebut akan disampaikan kepada pihak Kecamatan yang nantinya akan melalui proses verifikasi dan nantinya akan disampaikan kepada Pemerintah Kota Bontang.

Faktor-faktor penghambat dalam Koordinasi Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Kelurahan Guntung :

a. Hambatan Internal

Kesadaran masyarakat yang rendah merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Guntung. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan di Kelurahan Guntung. Keikutsertaan masyarakat secara aktif tidak dapat dipisahkan dari proses pelaksanaan pembangunan, karena pembangunan memerlukan sumber daya manusia yang aktif sebagai salah satu modal pokok untuk mencapai suatu pembangunan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat atau tingkat perekonomian masyarakat merupakan salah satu penghambat bagi masyarakat dalam berpartisipasi dalam program pelaksanaan pembangunan dimana diketahui bahwa saat ini masyarakat Kelurahan Guntung sebagian besar adalah masyarakat pekerja yang mayoritas masih mengutamakan kebutuhan dasar baik pangan maupun sandang. Keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Guntung, dipusatkan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga mengabaikan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam melaksanakan kegiatan program pembangunan di Kelurahan diperlukan kepedulian dari masyarakat terhadap pembangunan di wilayahnya, dengan kepedulian dari masyarakat akan dapat suatu pembangunan yang maksimal dan terarah. Kurangnya kesadaran yang dimiliki masyarakat di Kelurahan Guntung berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan penulis yang disebabkan kurangnya kemampuan masyarakat untuk memahami program pembangunan, padahal dengan tercapainya pembangunan yang merata akan tercipta kualitas hidup yang baik.

Masalah kebiasaan masyarakat juga merupakan suatu faktor penghambat masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. Hal tersebut berdasarkan atas hasil penelitian penulis yang menemukan besarnya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pembangunan dari Pemerintah Kota, sehingga hal-hal yang semestinya bisa dikerjakan oleh masyarakat selalu dibebankan oleh Pemerintah, hal ini menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.

b. Hambatan Eksternal

Hambatan masyarakat dalam berpartisipasi pada pelaksanaan program selain masalah internal juga dari kondisi eksternal, yakni di masalah yang datang berasal dari luar masyarakat pada hambatan eksternal penulis menjabarkan sebagai berikut :

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan kepada masyarakat, merupakan suatu hambatan eksternal. Kurangnya sosialisasi menyebabkan pembangunan menjadi terhambat, hal tersebut dikarenakan masyarakat tidak mengetahui akan diadakan suatu kegiatan pembangunan, sehingga ketika akan melakukan kegiatan warga masyarakat banyak yang tidak dapat ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sedangkan masyarakat adalah salah satu unsur terpenting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Akibatnya masyarakat kurang memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan. Dengan adanya sosialisasi terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dalam memaksimalkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta sepenuhnya dalam memajukan pembangunan diwilayah mereka.

Penutup

Dari hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menarik beberapa kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian.

Efektivitas Pembangunan yang meliputi :

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) didalam Koordinasi Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sudah berjalan optimal meski bukan hal yang mudah untuk melaksanakan pembangunan agar berjalan dengan lancar, oleh sebab itu perencanaan yang matang sangat dibutuhkan agar pembangunan bisa berjalan dengan baik. Selain itu rapat-rapat yang dilakukan bersama Lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tokoh Masyarakat, RT dan Tokoh Agama juga sangat membantu dalam mewujudkan pembangunan yang baik di Kelurahan Guntung.

Gambaran keberhasilan baik dari segi waktu, tenaga dan target penyelesaian didalam Koordinasi Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sudah berjalan dengan baik dan 75% telah direalisasikan. Sebagai bentuk Koordinasi Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ternyata kurang efektif seperti apa yang diharapkan, sebagaimana pengertian koordinasi yang sesungguhnya, yaitu koordinasi merupakan perwujudan dari kerjasama, saling bantu membantu dan menghargai dan menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing. Hal ini disebabkan karena satuan kerja atau unit dalam melaksanakan kegiatannya tergantung atas bantuan dari satuan kerja atau unit yang lain.

Faktor pendukung dalam penelitian ini adalah partisipasi yang tinggi dari lingkungan masyarakat dimana kesadaran masyarakat sangat penting di dalam pelaksanaan pembangunan agar dapat menghasilkan pembangunan yang lebih baik.

Faktor penghambat merupakan hal yang paling mendasar dari ketidakefektifan suatu koordinasi di Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara tidak efektif, sebagaimana telah diketahui bahwa faktor penghambat yang ditemukan penulis yaitu aktivitas masyarakat di Kelurahan Guntung yang bersifat individualisme sebagaimana masyarakat kota yang kemudian menjadi fakta penguat bahwa terjadi ketimpangan dari teori koordinasi seutuhnya.

Membantu dan menghargai dan menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing. Hal ini disebabkan karena setiap satuan kerja (unit) dalam melaksanakan kegiatannya tergantung atas bantuan dari satuan kerja (unit) yang lain.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

Lebih di tingkatkan kembali Koordinasi Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menjalankan fungsi koordinasinya dalam pembangunan yang khususnya bersifat fisik, Perlu adanya sosialisasi yang sifatnya menumbuhkan arti pentingnya kebersamaan, sehingga meluluhkan sifat individualisme yang kemudian dapat memperkuat rasa kebersamaan.

Agar partisipasi masyarakat Kelurahan Guntung bisa maksimal dalam perencanaan program pembangunan, hendaknya Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bisa melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kelurahan membuat surat pemberitahuan kepada RT jauh-jauh hari sebelum dilaksanakannya partisipasi dalam pembangunan.
- b. Diadakannya rapat pada tingkat RT untuk membahas usulan yang akan di usulkan sehingga pada tingkat RT sudah dapat usulan skala prioritas.
- c. Pemerintah hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana bentuk usulan yang diterima dan dibawa ke musyawarah rencana pembangunan.

Dalam pelaksanaan program pembangunan hendaknya pemerintah :

- a. Pemerintah maupun instansi-instansi yang terkait, harus lebih transparan dalam penggunaan dana dan lainnya, agar masyarakat tidak bersifat apatis atas pelaksanaan program pembangunan yang sedang dijalankan.
- b. Pemerintah hendaknya melaksanakan pelatihan atau pendidikan khusus kepada Lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) agar mampu menunjang program pelaksanaan pembangunan.
- c. Pemerintah hendaknya lebih melakukan sosialisasi atau pengarahan kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan atau dialog yang melibatkan masyarakat sampai pada masyarakat agar lebih bisa memahami program pembangunan yang sedang berjalan.

Hasil pembangunan yang telah dicapai hendaknya dipelihara secara baik oleh masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Diharapkan juga Pemerintah dapat lebih meningkatkan pembangunan-pembangunan fisik yang lebih diperlukan oleh masyarakat misalnya pembangunan jalan, pembuatan pos-pos ronda dan sebagainya demi kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Guntung.

Daftar Pustaka

- Affifuddin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori dan Emplementasinya di Era Reformasi*, Bandung: Alfabeta
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE
- Kartasmita, Ginanjar. 1996. *Administrasi Pembangunan Pengembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Khairuddin. 2000. *Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek Sosiologi Ekonomi dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty
- Manila. 1996. *IGK Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka
- Siagian, Sondang P. 2001. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Supriady Bratakuumah, Deddy., dan Riyadi. 2005 *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tarigan, R. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tjokroamidjojo,Bintoro. 1977. *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: Gunung Agung
- Usman,Sunyoto. 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 *Tentang Kelurahan.*, Jakarta: Penerbitan Grafika offset